

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam satu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi (Wahyudin dan Yuliadi, 2013).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dengan disertai oleh perbaikan sistem dan kelembagaan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2015).

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi dan dapat terjadi ketika kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Ketimpangan wilayah juga dapat disebabkan oleh karena adanya perbedaan

demografi yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografi ini seperti perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan daerah, perbedaan tingkat kesehatan dan pendidikan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku, dan perbedaan dalam etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografi yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja. (Syafirizal, 2012).

Menurut BPS, dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat dengan indeks gini (*gini ratio*) sebagai metode perhitungan. Indeks gini dapat dilihat dalam kisaran 0 – 1. Apabila angka indeks gini mendekati 0 maka ketimpangan pendapatan semakin rendah (merata) atau dengan kata lain pemerataan sempurna, namun jika angka indeks gini mendekati 1 maka ketimpangan antar masyarakat tidak merata atau terjadi ketimpangan. Oleh karena itu apabila indeks ratio suatu wilayah telah mencapai angka 0,4 maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut mengalami tingkat ketimpangan yang parah.

**Tabel 1.1**  
**Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018**

Provinsi	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	0,431	0,431	0,411	0,413	0,390	0,394
<b>Jawa Barat</b>	<b>0,413</b>	<b>0,415</b>	<b>0,413</b>	<b>0,403</b>	<b>0,405</b>	<b>0,402</b>
Jawa Tengah	0,379	0,382	0,366	0,365	0,357	0,361
DIY	0,419	0,433	0,420	0,432	0,422	0,423
Jawa Timur	0,369	0,415	0,402	0,396	0,371	0,379
Banten	0,395	0,401	0,394	0,382	0,367	0,365
Indonesia	0,406	0,408	0,397	0,393	0,384	0,382

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan table 1.1 di atas nilai indeks rasio pada Provinsi Jawa Barat menduduki urutan kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai indeks ratio pada tahun 2018 sebesar 0,405, sedangkan nilai indeks ratio

terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 0,357. Terdapat tiga Provinsi dengan nilai indeks ratio diatas angka nasional pada tahun 2018 sebesar 0,384, yaitu tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,422, Jawa barat (0,405), DKI Jakarta (0,390).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Disuatu daerah dengan IPM yang tidak merata dapat menyebabkan daerah yang angka IPMnya tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik serta dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Menurut Todaro (2011) menjelaskan IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasi pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dengan kata lain IPM yang tinggi mampu mengurangi tingkat ketimpangan pada masyarakat.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan indeks pembangunan manusia berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan. Rendahnya IPM menyebabkan produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat akan menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan dan sebaliknya (Pradnyadewi T dan Purbadharmaja, 2017).

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi**  
**di Pulau Jawa Tahun 2014-2018 (Persen)**

No	Provinsi	Tahun					Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	DKI Jakarta	78.39	78.99	79.60	80.06	80.47	79.50
2	Jawa Barat	68.80	69.50	70.05	70.69	71.30	70.07
3	Jawa Tengah	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12	69.98
4	DI Yogyakarta	76.81	77.59	78.38	78.89	79.53	78.24
5	Jawa Timur	68.14	68.95	69.74	70.27	70.77	69.57
6	Banten	69.89	70.27	70.96	71.42	72.95	71.10
	Indonesia	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	70.17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2014-2018. Angka IPM setiap Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan. Terdapat perbedaan nilai IPM antar Provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke empat dengan rata-rata IPM sebesar 70,07 persen. Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Terdapat tiga indikator untuk mengukur IPM yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dimana dalam ketiga indikator tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk meningkatkan nilai IPM dapat diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Masruri (2016) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini

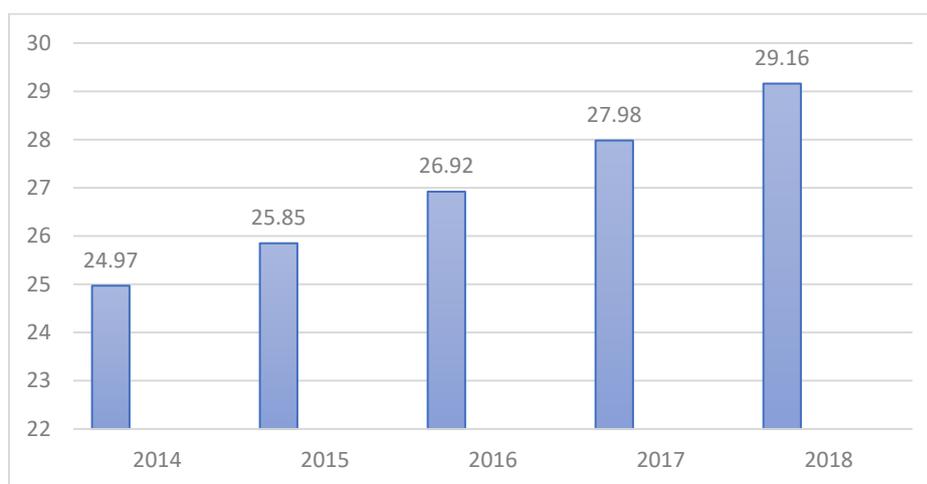
dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan usia non-produktif di Provinsi Jawa Tengah, sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu. Pencapaian PDRB per kapita digunakan sebagai indikator pembangunan dan untuk melihat seberapa besar tingkat kemakmuran suatu wilayah. Tingginya PDRB per kapita suatu daerah akan menyebabkan meningkatnya potensi sumber penerimaan daerah karena pendapatan masyarakat dalam daerah tersebut semakin besar (Simanjutak, 2001). Hal ini dapat diartikan semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin sejahtera penduduk daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan merata antar wilayah maka ketimpangan pendapatan akan berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke 5 dari 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 3,87 persen.

Berdasarkan gambar 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Tingginya angka PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh tingkat persebaran pendapatan yang tidak merata. Besarnya pendapatan perkapita menurut kabupaten/kota, penduduk yang

tinggal di Kota Bandung PDRB perkapitanya tinggi yaitu sebesar Rp 73.924.026,21. Sedangkan kabupaten/kota dengan angka PDRB perkapita terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 13.315.652,41. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah (BPS Jawa Barat, 2019).

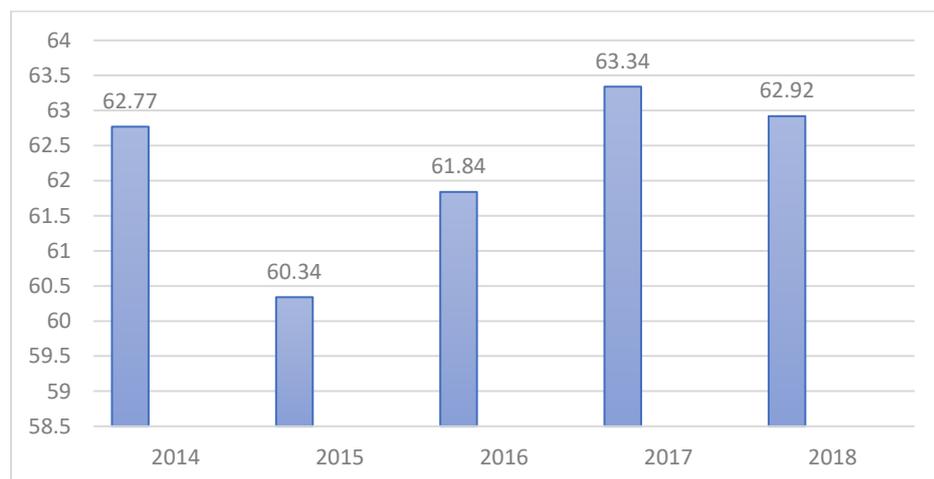


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Nilai PDRB Perkapita di Provinsi Jawa Barat ADHK 2010**  
**Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)**

Rosa dan Sovita (2016) dalam penelitiannya PDRB per kapita mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Kenaikan PDRB perkapita meningkatkan akan meningkatkan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Sementara dalam penelitian Bratoefa dan manoleva (2017) yang meneliti tentang ketimpangan pendapatan di Bulgaria. Dalam penelitiannya PDB per kapita mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Bulgaria, kenaikan PDB per kapita akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi Bulgaria tidak didistribusikan secara merata diantara penduduk.

PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja, apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai tambahan barang dan jasa akhir dalam unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Menurut Arthur Lewis, semua sektor industri harus tumbuh bersama untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga kerja disektor pertanian kesektor industri. Dalam keadaan tersebut, peranan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan (M.L.Jhingan, 2010).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.2**  
**TPAK Menurut Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan TPAK tahun 2014-2018 di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2018 tertinggi di Kabupaten Pangandaran sebesar 77,91 persen dan terendah yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 58,63 persen. Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada

ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (Wiratno, 2009).

Dalam penelitian Hartono (2010) bahwa variabel TPAK berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Masruri (2016) dengan menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa variabel TPAK berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dimana kenaikan TPAK akan meningkatkan ketimpangan pendapatan secara tidak signifikan.

Menurut Sukirno (2016) bahwa perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah seperti pemerataan pendapatan. Tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan jurang golongan masyarakat yang sudah ada dan menjadi bertambah luas. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan angka ketimpangan suatu wilayah menjadi meningkat.

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Pada tahun 2018 Jawa Barat memiliki jumlah penduduk mencapai 48.683.861 juta jiwa yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Sebaran penduduk di Jawa Barat belum merata, hal ini terlihat dari hampir setengah

penduduk di Jawa Barat tinggal di wilayah perkotaan sebesar 72,5% hal ini terjadi karena akibat masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi. Penelitian Rosa dan Sovita (2016) menjelaskan variabel jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam Islam tegas memberi garis kepada penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Adapun Ayat yang menerangkan tentang distribusi pendapatan, yaitu (QS Al-Hasyr 7) :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ  
 لِيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَ  
 مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

*“Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS Al-Hasyr:7)*

Makna dari ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditi di antara golongan orang kaya saja. Untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, shodaqoh, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi harta milik satu golongan saja.

Hal ini menjadi pembelajaran harta secara benar dalam mendistribusikan kekayaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks (World Bank, 2016). Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam **“Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan dengan permasalahan yang sama dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai latihan yang digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penelitian tentang determinan ketimpangan ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian

selanjutnya mengenai determinan yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Determinan Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam sebuah kebijakan yang akan diambil, terutama dalam kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat yang harus ditingkatkan untuk kedepannya.